

ISLAM DAN SEMPALAN EKSTREM¹

Oleh Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid pernah menggemparkan karena pemikirannya yang dianggap kontroversial. Penggemparan itu terjadi sebelum ia pergi ke negeri Paman Sam, Amerika. Baru beberapa bulan tinggal di Indonesia, setelah meraih gelar doktor di Universitas Chicago, AS, dalam ilmu filsafat dan teologi Islam ia kembali menurunkan pikiran-pikiran yang kritis. Berikut ini petikan penuturannya kepada Bambang Harymurti dari Majalah *TEMPO* perihal hubungan ABRI dengan Islam di Indonesia:

Sebenarnya saya khawatir kurang *up to date* karena sudah enam tahun tidak di sini. Jadi, yang saya berikan kesan saja, yang belum tentu didukung dengan fakta yang kuat.

Pertama, saya berpendapat bahwa ABRI itu maunya netral terhadap agama Islam. Dalam arti — mungkin banyak yang tidak setuju dengan istilah ini — mau berdiri di atas semua kelompok agama. Bukan berdiri di atas agama, tapi di atas semua kelompok agama. Soalnya, ABRI merasa sebagai pewaris yang sebenarnya dari nilai-nilai 45, yang agaknya dipersepsi sebagai nilai revolusi dan nilai keindonesiaan yang sebenarnya.

¹ Majalah *TEMPO*, “Islam dan Sempalan Ekstrem”, 27 Oktober 1984. Pewawancara Bambang Harymurti.

ABRI antikomunis, dan sikap ini diikuti dengan tindakan nyata untuk menentang komunisme, bahkan juga Marxisme. Ini mempunyai implikasi yang positif sekali terhadap umat Islam. Dengan kata lain, ABRI secara tidak langsung sangat menguntungkan kaum Islam, sebab di Indonesia ini tidak ada saingan yang begitu vokal dan militan terhadap Islam seperti komunisme.

Lebih dari itu, secara individual, orang-orang ABRI juga banyak sekali berbuat untuk agama Islam, misalnya lewat PTDI. Yang aktif di Muhammadiyah juga banyak. Kemudian ada juga PADI yang agak eksklusif ABRI. Lalu ada mubalig individual, seperti Isa Edris dan Yunan Helmi Nasution.

Tentu saja ada sudut pandangan lain, yaitu: Apa yang tidak diperbuat ABRI terhadap Islam. Itu pendekatannya negatif, dengan tidak. Seperti tidak mendirikan ini, tidak membangun itu.

Sikap ABRI terhadap Islam ada tahapan-tahapannya juga. Lihat saja, misalnya jika kita ambil pemilu sebagai indikator. Pada pemilu pertama 1955, ada optimisme dari golongan Islam bahwa mereka yang dipimpin Masyumi, akan menang. Sebaliknya, ada juga kekhawatiran — yang tampaknya berlebihan — bahwa Islam akan menang dan Indonesia akan menjadi negara Islam. Ternyata, umat Islam hanya mendapat posisi kedua dan ketiga (urutannya PNI, Masyumi, NU, dan PKI).

Pada Pemilu 1971, ABRI mengambil-alih ketakutan PNI dan PKI terhadap kemenangan Islam. Karena itu ABRI, melalui Golkar, memasang kuda-kuda, agar Islam tidak menang. Kekhawatiran ini sebagian karena kesalahan umat Islam sendiri. Sampai sekarang kebanyakan orang Islam masih mempunyai persepsi, kalau menang dalam pemilu, itu terjemahannya kemenangan politik. Dan ada kelompok-kelompok yang menganggap, kemenangan politik itu harus diterjemahkan dalam bentuk negara Islam. Saya kira, latar belakang mengapa Presiden Soeharto menginginkan betul agar partai-partai berasas tunggal Pancasila ya, supaya tidak terjadi hal semacam itu.

Secara terus terang, pada Pemilu 1971 pendekatan Golkar dalam menghadapi pemilu agak negatif terhadap Islam. Karena itulah

dipasang orang-orang yang diharapkan merupakan saingan atau pengerem, kemungkinan Islam itu maju, misalnya orang-orang kepercayaan.

Pemilu 1977 sudah berbeda sekali. Memang ada konsistensi, tapi juga ada proses. Waktu itu Golkar sangat mendekati Islam, sampai seorang pengamat dari luar, R. William Liddle, dari Universitas Ohio, AS, mengatakan bahwa Golkar pada tahun 1977 itu menganut *me tooism*, saya juga Islam. Untuk itu mereka menggunakan mubalig, dai, dan sebagainya.

Sepanjang pengetahuan saya, pendekatan yang pernah dilakukan Jenderal Widodo dan Widjojo Sujono pada akhir 1970-an mewakili suatu gejala dalam ABRI. Yakni semacam perasaan aman yang tumbuh terhadap Islam. Artinya Islam dianggap bisa dikendalikan. Kemudian mereka pun merasa aman untuk menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Ini tumbuh terus sampai sekarang.

Gejala tumbuhnya fundamentalisme memang ada, tapi bukan ideologis, melainkan sosial psikologis. Jadi sebetulnya ada perasaan tidak berdaya menghadapi Barat, yang menimbulkan reaksi fundamentalistis. Ironisnya, perasaan ini memperoleh ekspresi terkuat justru di kalangan orang Islam yang mulai ikut serta dalam kebudayaan Barat, dalam arti terdidik secara Barat. Seperti ketika Masyumi mengemukakan ingin mendirikan negara Islam, unsur-unsurnya kebanyakan yang berpendidikan Barat.

Saya melihat bahwa generasi yang sekarang ini, lebih bisa memahami dan menerima Pancasila. Saya kira Pancasila harus dipersepsi sebagai ideologi terbuka, jangan dijadikan atau dirumuskan menjadi dogma-dogma. Jadi ideologi terbuka hingga mempunyai kemampuan untuk mewadahi siapa saja. Tentu saja dalam wadah yang demikian lebar harus ada aturan permainan, yang dalam Pancasila sendiri telah ditetapkan. Misalnya prinsip musyawarah dan mufakat.

Kejadian yang baru-baru ini, saya kira itu tak akan menjadi *setback*. Lihat saja sikap Jenderal Try setelah peristiwa Tanjung Priok, atau pernyataan Jenderal Benny, ketika menegaskan, peris-

tiwa itu bukan peristiwa agama. Dan ini betul. Saya melihat pernyataan itu benar, dalam arti tidak mau meruncingkan. Sebab meski pemeran peristiwa itu orang Islam, karena Indonesia itu kebanyakan penduduknya orang Islam. Kalau seandainya mayoritas penduduknya Katolik, ya, orang Katolik ekstrem yang akan melakukan itu.

Ide negara Islam, saya kira, sekarang hanya tumbuh di kalangan sempalan yang ekstrem. Umat Islam sendiri tentunya mengalami evolusi pemikiran. Dan itu mulai terbaca oleh ABRI. Karena itu pendekatan ABRI kini mulai positif, dan itu baik sekali untuk perkembangan seluruh Indonesia. Adanya imbauan Pangab agar umat Islam sendiri melakukan pengamanan, merupakan suatu indikasi bahwa di kalangan umat Islam sendiri ada kelompok yang bisa mencegah. [❖]